

BAB 1

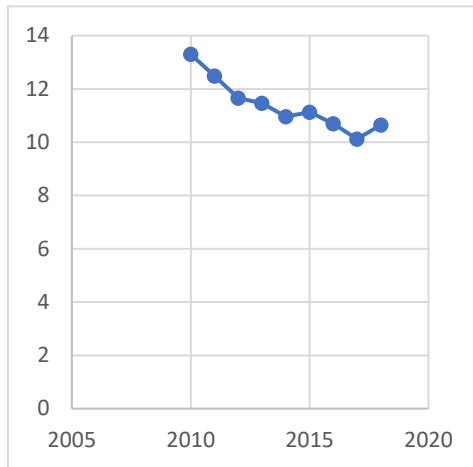
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

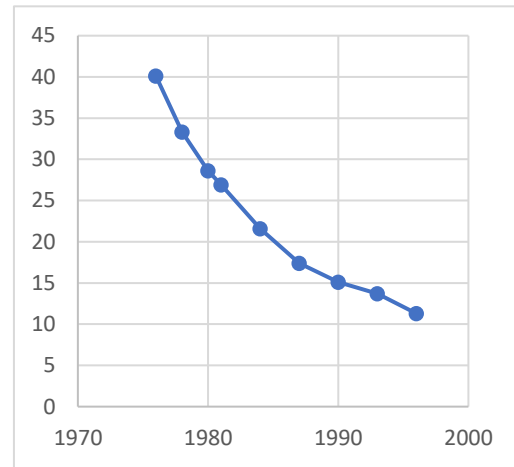
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua problematika makroekonomi yang sering menjadi fokus pembuat kebijakan dan ekonom melalui deklarasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua permasalahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi akibat kurangnya produktivitas suatu negara yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja rendah. Kedua, hambatan tersebut terjadi pada sisi konsumsi akibat melemahnya daya beli masyarakat karena hidup dibawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri pada Tahun 2010-2018 dilaporkan masih konsisten diatas 10%. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 (a) yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2010-2018, penurunan cenderung lambat dari 13,3% pada 2010 menjadi 10,65% pada 2018.¹ Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi pada periode itu pun lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru yang merupakan salah satu periode yang mengagumkan dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Tahun 1976-1996, tingkat kemiskinan menurun drastis dari kisaran 40% menjadi 11,3% seperti terlihat pada Gambar 1.1 (b). Selain itu, rasio gini di Indonesia juga masih berada diatas batas psikologis pada era Orde Baru yang rata-rata berada pada level 0,35-0,36, dimana angka rasio gini pada periode Tahun 2010-2018 seperti terlihat pada Gambar 1.1 (c).

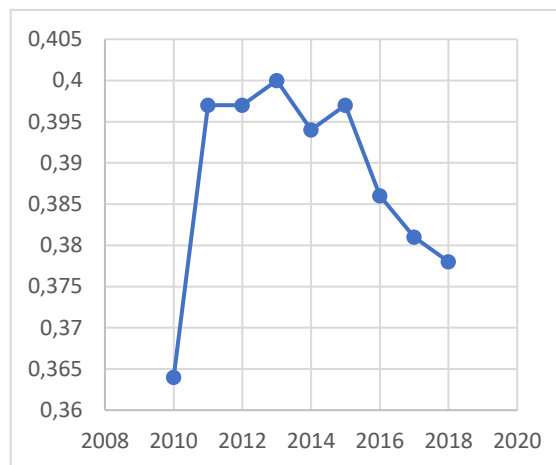
¹ Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia (BPS diolah)



(a)



(b)



(c)

Penurunan lambat tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada Tahun 2010-2018 dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, penurunan kemiskinan secara natural akan lebih lambat jika tingkat kemiskinan berada pada level yang lebih rendah dibandingkan ketika tingkat kemiskinan berada pada level tinggi. Kedua, pengentasan kemiskinan pada tingkat yang lebih rendah menjadi lambat disebabkan kemiskinan yang dihadapi adalah kemiskinan kronis yang penanganannya relatif lebih kompleks dan terjadi di jangka panjang.

Selain itu, isu yang paling mendasar dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah ketepatan program sasaran. Eksekusi kinerja sasaran

program pada Tahun 2008 masih belum dikatakan baik karena hanya 30% penduduk miskin yang menikmati program dari pemerintah, yaitu Beras Miskin, Bantuan Langsung Tunai dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Susenas, 2008). Hal ini kemudian menjadikan fungsi ranah fiskal perlu dilengkapi dengan fungsi ranah moneter dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Fungsi moneter dapat dijelaskan melalui perkembangan sektor keuangan yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali industri perbankan. Lembaga intermediasi ini mengalokasikan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana dan memiliki aktivitas produktif dalam penggunaan dana tersebut. Kim dkk. (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan sebagai indikator perkembangan perbankan, berkontribusi positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi dikarenakan sektor keuangan berperan penting sebagai penyangga sektor riil dalam hal pembiayaan pada perekonomian.

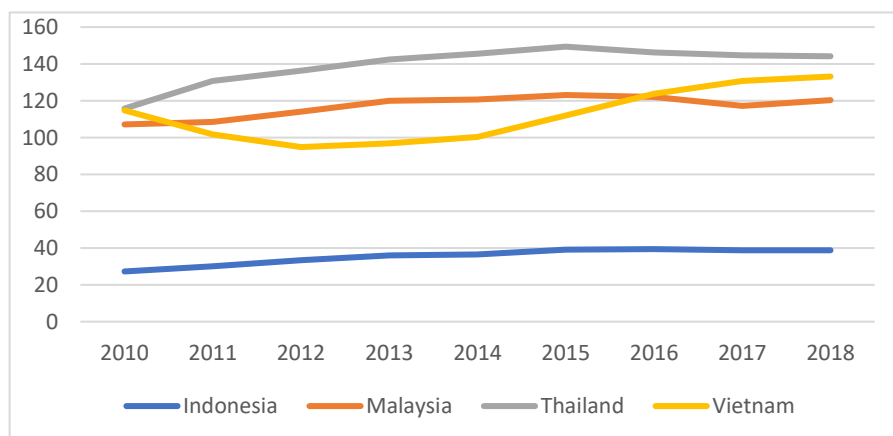
Transmisi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memperbesar skala sektor-sektor dalam perekonomian, sehingga menciptakan lapangan kerja yang semakin luas dan mengurangi pengangguran. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi memiliki implikasi pada kemiskinan dan ketimpangan jika kue pertumbuhan tersebut tersebar secara merata. Perera & Lee (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif signifikan dengan kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan akibat pertumbuhan yang rata-rata hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya.

Sebagai konteks kemiskinan, menurut salah satu literatur seperti Honohan (2004), penetrasi perbankan yang dihitung dari total kredit bank, jumlah ATM dan kantor cabang bank per 100.000 orang dewasa, memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Perkembangan sektor keuangan melalui penetrasi perbankan ini memperjelas bahwa peran dari perbankan memiliki efisiensi pengalokasian sumber daya untuk membantu orang miskin dalam mendorong investasi komersial maupun meningkatkan akumulasi modal manusia dalam hal pendidikan sehingga dapat mengurangi

poverty trap secara efektif (Allen dkk., 2012 dan Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013).

Rosen (1989) mendefinisikan modal manusia sebagai seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang termasuk dalam diri manusia. Pengetahuan ini, yang diberikan melalui pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan pendapatan. Pendekatan modal manusia menganggap pendidikan sebagai instrument penting dalam mengurangi kemiskinan.

Perkembangan industri perbankan di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan jika menggunakan indikator rasio kredit bank terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Seperti yang terlihat Gambar 1.2, rasio kredit terhadap PDB meningkat dari 27,25% menjadi 38,81%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara *peers* seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, Indonesia berada jauh dibawahnya. Rata-rata rasio kredit terhadap PDB di ketiga negara itu sebesar 122,8%. Salah satu hal yang mungkin dapat menjelaskan mengapa rasio kredit bank terhadap PDB di Indonesia rendah dibandingkan negara *peers* yaitu disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap perbankan, rumitnya proses administrasi dan penilaian kredit yang masih konvensional.



Gambar 1.2
Rasio Kredit terhadap PDB, 2010-2018 (%)
(Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam)

Sumber: World Bank, diolah

Indikator lainnya seperti jumlah kantor cabang bank per 100.000 orang dewasa di Indonesia yang awalnya pada Tahun 2010-2014 juga mengalami tren peningkatan sebesar 17,919 per 100.000 orang dewasa menjadi menurun dari 2015-2018 sebesar 16,243 per 100.000 orang dewasa. Namun, dengan pesatnya peningkatan dari Tahun 2010 ke Tahun 2011, Indonesia menempati urutan pertama dari negara *peers* (Malaysia, Thailand dan Vietnam). Disisi lain, perkembangan *Automated Teller Machines* (ATM) per 100.000 orang dewasa dari Tahun 2010-2018 rata-rata sebesar 41,68 ATM per 100.000 orang dewasa yang hanya tertinggal jauh dari Thailand.

Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan pada Tahun 2010-2018 yang bertolak belakang dengan tren penetrasi perbankan di Indonesia ini kemudian memunculkan isu mengenai peran perbankan dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, padahal beberapa literatur menyebutkan bahwa kedalaman, aksesibilitas, dan layanan sektor keuangan khususnya perbankan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan disamping dengan kebijakan fiskal (Donou-Aldonso & Sylwester, 2016; Rewilak, 2017; Neaime & Gaysset, 2018; Iqbal dkk., 2019).

Disisi lain, dampak dari industri perbankan atas penyaluran kredit dapat mengganggu akumulasi kekayaan penduduk miskin dan mengarah pada *poverty trap* karena kredit yang diperoleh memicu konsumsi yang tinggi alih-alih aktivitas produktif karena individu lebih peduli mengenai status ekonomi mereka di masyarakat (Moav & Neeman, 2012 dan Frank dkk., 2014). Demirgüç-Kunt dan Klapper (2012) menemukan bahwa akses keuangan terhadap perbankan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, stimulus tersebut tidak membantu orang miskin. Selain itu, penjelasan lain bahwa kredit perbankan tidak memiliki hubungan kuat dengan kemiskinan adalah kurangnya aktivitas kewirausahaan seperti yang ditemukan oleh Cumming dkk (2016) di negara MENA.

Sedangkan dalam konteks rasio gini, Honohan (2004) menjelaskan bahwa penetrasi perbankan hanya mendorong pertumbuhan PDB dan tidak serta merta menyarankan bahwa penetrasi perbankan dapat membantu orang keluar

dari kemiskinan. Peningkatan tingkat kredit perbankan ini meningkatkan PDB hanya dengan meningkatkan pendapatan penduduk kaya dan meninggalkan mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah. Hal ini bisa terjadi dalam dua kemungkinan. Pertama, penduduk miskin tidak dapat mengakses kredit bank dengan mudah karena berisiko gagal bayar. Kedua, penduduk miskin menggunakan kredit bank untuk meningkatkan konsumsi mereka daripada menggunakannya untuk aktivitas produktif, sehingga mereka akan tetap dalam kondisi *poverty trap*.

Penelitian mengenai pengentasan kemiskinan dan ketimpangan penting untuk dilakukan karena pengentasan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia berjalan alot pada Tahun 2010-2018. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi fundamental dasar dalam perluasan komponen kebijakan yang tidak hanya dari komponen fiskal, tetapi juga komponen moneter yang diperlukan untuk menguatkan kedua kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang sinergis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini dapat menjadi landasan dasar untuk kebijakan strategis pemerintah dalam jangka menengah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini hanya menggunakan indikator industri perbankan alih-alih sektor keuangan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran spesifik dari industri perbankan terhadap kemiskinan dan ketimpangan, mengingat industri perbankan mempunyai pangsa pasar terbesar di sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya oleh Pasuhuk (2018), yaitu metode *Generalized Method of Moment*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai peran industri perbankan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Seperti Neaime & Gaysset (2018) yang meneliti tentang pengaruh inklusi keuangan dengan indikator jumlah kantor cabang bank dan jumlah ATM per 100.000

orang dewasa terhadap kemiskinan dan ketimpangan di negara *Middle East and North Africa* (MENA), Iqbal dkk. (2019) yang meneliti tentang pengaruh layanan perbankan terhadap kemiskinan di Bangladesh dan Ayyagari dkk. (2019) yang meneliti tentang hubungan kedalaman keuangan dan kemiskinan di India.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai peran penetrasi perbankan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan masih jarang dilakukan. Beberapa peneliti seperti Sukomo & Prawiranegara (2019) hanya melakukan penelitian sebatas provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana dan seberapa jauh penetrasi perbankan tersebut dapat memberikan insentif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengestimasi peran penetrasi perbankan (total kredit dan jumlah kantor cabang bank) dalam membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia.
2. Melihat secara empiris manakah yang memiliki dampak signifikan antara total kredit dan jumlah kantor cabang bank dalam membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Bab 1 berisi latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 memuat tentang teori dan studi terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian serta landasan penelitian terdahulu. Bab 3 menjelaskan tentang kerangka berfikir, rancangan model, definisi variabel dan indikator (definisi operasional) – tahapan, hipotesis, ruang lingkup penelitian, sampel dan jenis data, sumber data serta metode pengumpulan data. Bab 4

menjelaskan tentang pembahasan hasil estimasi dari topik penelitian. Bab 5 berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan.